

<b>PRIORITAS 1</b>	<b>REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA</b>
TEMA PRIORITAS	<i>Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik</i>
PENANGGUNGJAWAB	Wakil Presiden
BEKERJASAMA	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Perindustrian; Menteri Negara Koperasi dan UKM; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Keuangan; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sekretaris Kabinet

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
<b>1. STRUKTUR</b>										
Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; Restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014:										
1.	Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan	Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN.	Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN.	100%					29,35	Kemeneg PAN dan RB
Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya			Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya	20%	30%	50%	85%	100%		
		Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%			
2.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukam	Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Setneg)	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN)	20%	30%	50%	85%	100%		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%		
3.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I	Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang penguatan keberdayaan UKMK (Kemeneg UKMK, Kemen. Perindustrian, Kemen. Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kemen. Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. PU, Kemen. Kehutanan) dan Kemeneg PPN)	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase LPNK bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%		
4.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II	Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pengelolaan energi (Kemen. ESDM, restrukturisasi BUMN (Kemeneg BUMN), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. Pertanian) dan Kemeneg. Ristek).	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang	20%	30%	50%	85%	100%		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
5.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra	Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang kesra	telah tertata organisasi dan tata kerjanya							
			Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kemendiknas)	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase LPNK bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	20%	30%	50%	85%	100%		
			Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya	20%	30%	50%	85%	100%		
6.	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (grand design RBN dan kebijakan pelaksanaannya)	100%					62,67	Kemeneq PAN dan RB
			Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional	70%	80%	85%	90%	100%		
			Persentase instansi yang menerima sosialisasi	100% K/L 30% Pemda	50% Pemda	70% Pemda	80% Pemda	100% Pemda		
			Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi reformasi birokrasi	100% K/L, 10% Pemda	40 pemda	60 pemda	80 pemda	100% Pemda		
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	4 lap	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah) TOTAL	K/L
				2010 triwulanan	2011 triwulanan	2012 triwulanan	2013 triwulanan	2014 triwulanan		
			Persentase K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional	20 %				100%		
7.	Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP	Terselenggaranya pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tata laksana	Persentase pemenuhan peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanjian, peirizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta pelayanan bantuan hukum yang akuntabel	50%	60%	70%	80%	90%	66,0	KKP
<b>2. OTONOMI DAERAH</b>										
Penataan Otonomi Daerah melalui: 1) Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah										
1.	Penghentian/ Pembatasan Pemekaran Wilayah	Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/ pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.	Jumlah Strategi Dasar Penataan Daerah Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007 Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah	1 paket	100%	100%	100%	100%	20,00	Kemendagri
2.	Pembinaan Fasilitasi Dana Perimbangan	Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah Terwujudnya tertib administrasi	Persentase Provinsi, Kab/Kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Juklak Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan	70 % 70 % 1 paket	75 % 75 %	80 % 80 %	85 % 85 %	90 % 90 %	73,77	Kemendagri

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan	materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.							
		Tersusunnya kebijakan/ regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diterapkan di daerah	Jumlah Permendagri	6	3	3	3	3		
			Jumlah Surat Edaran Mendagri	2 SE	1 SE	1 SE	1 SE	1 SE		
3.	Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah	Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD	Persentase daerah yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung	30%	40%	50%	55%	60%		
			Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah	26%	27%	28%	29%	30%		
		Penetapan APBD secara tepat waktu	Persentase jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu.	60%	70%	80%	85%	90%		
4.	Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah	Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Persentase daerah provinsi, Kab/Kota ber-LKPD dengan status WTP.	15%	30%	50%	75%	100%		
		Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu	Persentase penetapan dan penyampaian Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.	40%	60%	70%	80%	90%		
5.	Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer	i. Persentase ketepatan jumlah penyaluran jumlah dana transfer ke daerah	100%	100%	100%	100%	100%	86,38	Kemenkeu

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
	pengelolaan transfer ke Daerah	Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah	2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	3 hari		
6.	Penyempurnaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggara ranya Pilkada yang efisien.	Persentase revisi terbatas UU No. 32 tahun 2004 terkait dengan efisiensi pelaksanaan Pilkada Jumlah UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%					3,0	Kemendagri
3. <b>SUMBER DAYA MANUSIA</b> Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011										
1.	Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur	Tersusunnya kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekrutmen dan Seleksi PNS Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi)	Jumlah PP Jumlah PP	1 PP	sosialisasi	sosialisasi			20,06	Kemeneg PAN dan RB
2.	Pengembangan kebijakan pematapan pengembangan SDM aparatur	Tersusunnya kebijakan tentang manajemen ke-pegawaian ( <i>UU tentang SDM Aparatur Negara</i> ).	- Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya		1 RUU	1 UU & peraturan pelaksanaannya	Sosialisasi	Sosialisasi	11,27	Kemeneg PAN dan RB

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
		Tersusunnya kebijakan tentang pola dasar karir PNS	- Jumlah Perpres;	1 Perpres	Sosialisasi					
		Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP)	- Jumlah PP	1PP						
		Tersusunnya kebijakan tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dlm dan dr jabatan struktural	Jumlah Perpres	1 Perpres						
		Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS	Jumlah PP		1 PP					
		Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Jumlah PP		1 PP					
3.	Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur	Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) ttg remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri	Jumlah UU/PP ttg remunerasi/ tunjangan kinerja Pegawai Negeri;	1 UU/ PP					16,25	Kemeneg PAN dan RB
		Tersusunnya kebijakan sistem pensiun PNS	Jumlah UU/PP tentang Pensiun PNS		1 UU/ PP					
		Tersusunnya kebijakan ttg sistem pengelolaan dana pensiun PNS	Jumlah kebijakan tentang pengelolaan dana pensiun PNS	1 PP						
4.	<b>REGULASI</b> Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011.									



NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
1.	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen	Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan	Jumlah perda yang dikaji	3.000 perda	9.000 perda	3.000 perda	2.500 perda	2.500 perda	12,50	Kemendagri
2.	Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah	Meningkatnya pemerin-tahan provinsi, kab/kota yang di petakan dan yang mempublikasikan perdanya dalam sistem informasi peraturan daerah	% pemerintahan daerah	20%	40%	60%	80%	100%	9.0	Kemenkumha m
3.	Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan</li> <li>2. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan</li> <li>3. Evaluasi dan rekomendasi Perda dan Raperda PDRD bermasalah</li> <li>4. Program transisi/pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah</li> <li>5. Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah</li> <li>6. Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak Daerah</li> <li>7. RPP tentang sistem pemungutan pajak daerah</li> <li>8. RPKM pemberian sanksi terhadap daerah yang</li> </ol>	80%	80%	82%	84%	85%	68,69	Kemenkeu
				15 hari	15 hari	14 hari	13 hari	12 hari		
				75%	80%	85%	90%	100%		
				-	50%	50%	100%	-		
				-	100%	-	-	-		
				-	50%	75%	100%	-		
				100%	-	-	-	-		
				100%	-	-	-	-		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
			melanggar ketentuan PDRD 9. Mengkaji penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsidi BBM	100%	-	-	-	-		
<b>5. SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH</b>										
Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah										
1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009	Jumlah SPM yang ditetapkan	13 SPM	17 SPM				7,50	Kemendagri
2	Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah	Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah	5 SPM	10 SPM	17 SPM			20,0	Kemendagri
			Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya				17 Bidang SPM			
			Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya					17 Bidang SPM		
3	Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik	Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik	Jumlah PP	5					18,28	Kemeneq PAN dan RB
			Jumlah Perpres	1						
			Persentase instansi yg mendapat sosialisasi	35%	70%	100%				
4	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial	Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Jumlah instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik	1					23,92	Kemeneq PAN dan RB
			Laporan hasil pelaksanaan penilaian pelayanan		1	1	1	1		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
		Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Jlh inpres tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	1						
		Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP	Persentase Pemda yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)	70%	75%	88%	90%	95%		
5	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan	Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/antar instansi dan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan	150 unit	200 unit	250 unit	300 unit	350 Unit	23,63	Kemeneq PAN dan RB
			Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan Provinsi	100 Kab/Kota	105 Kab/Kota	110 Kab/Kota	115 Kab/Kota	120 Kab/Kota		
			Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian	50%	60%	70%	80%	90%		
			Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian	50%	60%	70%	80%	90%		
<b>6. PENEGAKAN HUKUM</b>										
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum										
1.	Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan	Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat masyarakat	Jumlah perkara dan clearance rate seluruh tindak pidana di wilayah Polda	55%	55%	57%	57%	58%	2.697,63	POLRI
2.	Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat MA dan badan peradilan di bawahnya	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	100	100	100	100	100	10.50	MA-RI
3.	Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda	pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara	•Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat	70%	75%	80%	85%	90%	2.0	Kemenkumha

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
	Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara		waktu dan akuntabel							m
4.	Pembinaan Kegiatan di bidang Keamanan dan Kertertiban	Lapas rutan memenuhi standar hunian dan keamanan, penanganan kasus NAPZA, penanganan aduan masyarakat / tahanan	•Persentase	10%	15%	20%	25%	30%	5.8	Kemenkumham
5.	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana	Tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel	•Persentase	62%	67%	72%	77%	82%	3.4	Kemenkumham
		Narapidana terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel	•Persentase	60%			80%			
		Narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel	•Persentase	60%			90%			
6.	Pembinaan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak	Penyelegaraan kebgiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentasi anak didik pemsyarakatan</li> <li>• Persentase klien pemsyarakatan</li> <li>• Persentse anak didik pemsyarakatan dan klien pemsyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel</li> </ul>	62%	67%	72%	77%	82%	7.1	Kemenkumham
7.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	•peningkatan kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja	10%	21%	31%	41%	51% atau 1377 Pegawai	38.0	Kemenkumham

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
8.	Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya	25%	47%	62%	85%	100% atau 5400 Pegawai	37.0	Kemenkumham
9.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya	20%	40%	60%	80%	100% atau 2400 pegawai	40.60	Kemenkumham
10.	Kegiatan Pendidikan Kedinasan	Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemyarakatan</li> <li>• Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian</li> </ul>	92%	93%	95%	97%		50.2	Kemenkumham
11.	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham	Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham	• Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir	100%	100%	100%	100%	100%	108.2	Kemenkumham
12.	Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus	Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu</li> <li>• Jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum</li> </ul>	20%	40%	60%	80%	100%	19.0	Kemenkumham
13.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.	• Jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional	35 diklat	36 diklat	36 diklat	38 diklat	40 diklat	420.00	Kejaksaan Agung
14.	Penyelidikan Tindak Pidana	Penyelidikan	Kasus Potensial (Kasus)	60	65	70	75	80	45.24	KPK

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
	Korupsi		Kasus Solid (Kasus)	28	30	40	42	45		
15	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	Penyidikan	Penyidikan (Perkara)	55	60	65	70	75	44.85	KPK
			Penyidikan Lengkap (Perkara)	38	40	42	45	47		
16	Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi	Penuntutan	Penuntutan (Perkara)	45	50	55	60	65	50.48	KPK
			Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri(Perkara)	38	40	42	45	47		
		Eksekusi	Pelaksanaan Pidana Badan (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%		
17	Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsup) TPK	Korsup Penindakan	Peningkatan Perkara yang disupervisi KPK (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	22.52	KPK
			Peningkatan Jumlah Penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan/SPDP (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%		
18	Pengelolaan LHKPN	Penanganan LHKPN	LHKPN yang diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara)	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	45.82	KPK
			Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara	330	400	440	480	510		
			Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)	3	4	4	5	5		
19.	Pengelolaan Gratifikasi	Penanganan Gratifikasi	Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi	300	330	360	390	420	15.42	KPK
			Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)	6	8	8	10	10		
			Jumlah Instansi/ Lembaga (Pem., BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi	2	4	6	8	10		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
20.	Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi	Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye	Jumlah Sekolah/ Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi	60	75	90	110	125	57.83	KPK
			Peningkatan Komunitas Anti Korupsi	15	15	20	20	30		
			Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah)	10	15	20	25	25		
21.	Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerjasama Antara Lembaga/Instansi	Kerjasama dengan Lembaga/Instansi	Tingkat Kepuasan Layanan Kerja sama Antar Lembaga (Indeks)	70%	75%	75%	80%	80%	24.71	KPK
22.	Penyediaan Data dan Informasi untuk Pemberantasan Korupsi	Teknologi Informasi	Pemenuhan permintaan informasi dan data (Persentase)	60%	65%	70%	70%	75%	15.69	KPK
23.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan Dumas	Kasus siap LIDIK (Jumlah)	56	72	80	88	96	24.98	KPK
24.	Seleksi Hakim Agung, seleksi ha-kim dan Pemberian Penghargaan Hakim	Memperoleh calon hakim agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	80 pendaftar	--	79 pendaftar	84 pendaftar	90 pendaftar	45,8	Komisi Yudisial
			Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi	6 CHA	--	30 CHA	27 CHA	9 CHA		
			Jumlah hakim berprestasi yg diusulkan menerima penghargaan	4 hakim	4 hakim	4 hakim	4 hakim	4 hakim		
			Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung	1 keg	1 keg	2 keg	2 keg	3 keg		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			Jumlah putusan hakim yang diteliti dan dianalisa	200 penelitian	200 penelitian	200 penelitian	200 penelitian	200 penelitian		
			% putusan hakim yang benar	100%	100%	100%	100%	100%		
			Biaya penelitian putusan hakim (dln ribu)	Rp.50.000	Rp.50.00 0	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.00 0		
			% peserta yg mendaftar dalam seleksi calon hakim agung	75%	--	75%	80%	85%		
			% Hakim Agung yang profesional hasil seleksi	75%	--	75%	80%	85%		
			% calon Hakim Agung yang lulus seleksi	75%	--	75%	80%	85%		
			% calon hakim yg me ndapat penghargaan	75%	75%	80%	85%	90%		
			Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	1000 org	1000 org	1200 org	1200 org	1300 org		
			Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi	500 peserta	500 peserta	600 peserta	600 peserta	650 peserta		
			% peserta seleksi calon hakim yang lulus sesuai kompetensi	80%	80%	80%	80%	80%		
			Penurunan biaya rata-rata seleksi calon hakim	20%	20%	20%	20%	20%		
			Biaya seleksi hakim agung per pendaftar (dln ribu)	Rp.32.500	--	Rp.42.350	Rp.46.580	Rp.51.24 0		
			Biaya pemberian penghargaan hakim (dln ribu)	Rp.1.000.00 0	Rp.1.000.00 0	Rp.1.100.000	Rp.1.000.00 0	Rp.1.200.0 00		



NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah) TOTAL	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
25.	Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan peningkatan kompetensi hakim	Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan profesionalisme hakim	Jumlah pengaduan masyarakat	1.719 lap	1.540 lap	1.390 lap	1.250 lap	1.130 lap	47,5	Komisi Yudisial
			Jumlah yang diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	15 sidang	20 sidang	20 sidang	25 sidang	25 sidang		
			% pengaduan masyarakat yang ditangani	70%	70%	75%	75%	75%		
			% hasil putusan Majelis Kehormatan Hakim yang sesuai dengan prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim	100%	100%	100%	100%	100%		
			Biaya penanganan laporan pengaduan masyarakat hingga tuntas	Penghematan 20%	Penghematan 20%	Penghematan 20%	Penghematan 20%	Penghematan 20%		
			Jumlah pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	5 pelatihan	5 pelatihan	7 pelatihan	7 pelatihan	9 pelatihan		
			% Peningkatan kemampuan dan profesionalisme hakim	80%	80%	85%	85%	90%		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (Milyar Rupiah)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
<b>7. DATA KEPENDUDUKAN</b>										
Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011										
1.	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk.	497	497				6.600 (Angka sementara untuk 5 tahun. Kepastian alokasi dana pertahun menunggu penyelesaian Grand Design)	Kemendagri
			Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari	4,2 juta jiwa di 6 kab/kota	67,29 juta jiwa di 191 kab/kota	100,51 juta jiwa di 300 kab/kota				